

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ihwansyah, Isis, dkk, 2020, *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Strategi Pemberdayaan Potensi BUM Desa*, Keni Media, Bandung.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prana Media Grup, Jakarta.
- Karianga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, PT Alumni, Bandung.
- Kusdarini, Eni, 2011, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Phillipus, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*, Indepth, Bandar Lampung.
- Sadjiono, 2008, *Memahami Bberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta.
- Silahuddin, M, 2015, *Desa Membangun Indonesia, Buki 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Indonesia*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Solekhan, M, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.

Sri Kusuma, Amelia, 2010, *Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat Dalam Pendirian Badan Hukum Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)*, Promotor III.

Suratman, Phillip Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Surjadi, A, 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Bandung.

Syafrudin, Ateng, 2010, *Republik Desa*, PT Alumni, Bandung.

Winarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertipikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

JURNAL DAN WEBSITE

Alfiansyah, 2021, “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas di Undangkannya Undang-undang Cipta Kerja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5, Nomor 2, 2021.

Damang, “Pengertian Kewenangan”, www.negarahukum.com/hukum/pengertianke-wenangan.html, dikunjungi pada tanggal 20 Juli pukul 21.00.

Hasjimzoem, Yusnani, 2014, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justitia* Jurnal Ilmu Hukum VIII.

Michael, Doni, 2016, “Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* Vol. 13, Nomor 13, 2016.

Suwondo, dkk, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Penguat Ekonomi, *Universitas Brawijaya*, Vol. 1, Nomor 6.

Syncore, “Kewajiban Peran, dan Wewenang Pelaksana Operasional Bumdes”, <https://bumdes.id/blog/2017/10/24/kewajiban-peran-tugas-dan-wewenang-pelaksanaan-operasional-bumdes/> diakses pada 29 Juli 2021.

